

# PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PERAN PENGELOLAAN KEUANAGAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Siti Afifah, Fadli, Baihaqi

*Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*

---

## Abstract

This study aims to examine the effect of the application of government accounting standards, the implementation of government internal control system, human resource competence and utilization of information technology and the role of Financial Administration Officials-Organization of Regional Devices on the quality of local government financial statements. In this study the sample used is the Regional Government Organization of Bengkulu Province. Tests conducted on the data that was obtained from the questionnaire of 72 respondents. The technique that used to test this research are the validity test and reliability test while hypothesis testing is done by using regression analysis.

The results of the study show that (1) the application of Government Accounting Standards positively influence on the quality of Local Government Financial Statements, (2) The implementation of Government Internal Control System positively influence on the quality of Local Government Financial Statements, (3) Human Resource Competence positively influence on the quality of Government Financial Report Region, (4) Utilization of Information Technology positively influence on the quality of Local Government Financial Statements, (5) The Role of Financial Administration Officials-Organization of Regional Devices positively influence on the Quality of Local Government Financial Statements

Keywords: Quality of Financial Report, Accounting Standard, Internal Control, Competence, Information Technology.

---

## 1. Pendahuluan

Orientasi reformasi pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar pengelolaan keuangan uang rakyat dapat dilakukan secara transparan, baik dalam tahap penyusunan, penggunaan maupun pertanggungjawabannya. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam LKPD diwajibkan menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan menyusun keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010), karena pada saat ini masyarakat mengharapkan adanya akuntabilitas publik dalam proses pengelolaan keuangan dilingkungan pemerintah daerah karena masalah ini merupakan salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara cermat (Mardiasmo, 2004).

LKPD yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelola organisasi. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas baik menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 harus mencakup empat karakteristik kualitatif yang disyaratkan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk kedua kalinya mendapatkan opini Wajar Dengan Pegecualian (WDP) atas LKPD tahun 2015 dan tahun 2016 dari BPK setelah 4 tahun sebelumnya dari tahun 2011- 2014 Provinsi Bengkulu mendapatkan opini WTP secara berturut-turut.

Faktor penyebab LKPD Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapatkan opini WDP ditahun 2015 dan 2016 disebabkan oleh :

- Pencatatan pengeluaran kas dan mekanisme pengajuan ganti uang persediaan yang tidak sesuai prosedur, Pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran tidak tertib dan terjadi kekurangan kas serta penggunaan kas di bendahara pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan.
- Terdapat minimal 537 rekening giro dan belum di tutup dan tidak termasuk dalam rekening sah OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016.
- Pengelolaan aset tanah Pemerintah Provinsi Bengkulu belum optimal dan terdapat selisih/tidak dapat ditelusuri atas aset tanah pemerintah provinsi Bengkulu.
- Data base ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak dapat menyajikan data yang andal.
- Penganggaran dan realisasi belanja barang dan jasa untuk kegiatan fasilitasi bagi organisasi kemasyarakatan pada tiga OPD tidak sesuai ketentuan dan membebani keuangan daerah.
- Pengelolaan kas pada empat bendahara pengeluaran OPD di lingkungan pemerintah provinsi Bengkulu tidak tertib dan terjadi kekurangan.
- Realisasi pemberian honor kegiatan di beberapa OPD melebihi standar biaya masukan.
- Belanja barang dan jasa pada 9 OPD masih ada yang tidak sesuai ketentuan (Sumber: LHP BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2016-2017).

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Apakah penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- Apakah kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah?
- Apakah peran PPK-OPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

## 2. Tinjauan Pustaka

### 2.1. Teori Stewardship

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah teori stewardship (Donaldson dan Davis, 1991) yang menggambarkan suatu keadaan dimana para manajemen tidak termotivasi pada kepentingan – kepentingan individu melainkan lebih memfokuskan diri pada sasaran utama yang berupa kepentingan organisasi. Filosofi mengenai teori stewardship didasarkan pada sifat manusia

yaitu mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, memiliki integritas dan berlaku jujur. Berdasarkan filosofi tersebut maka dapat dikatakan bahwa teori *stewardship* ini memiliki pandangan bahwa manajemen akan berperilaku baik terhadap kepentingan publik. Secara tidak langsung teori ini menggambarkan hubungan yang erat antara kepuasan dengan keberhasilan organisasi dimana hal tersebut menjadikan teori ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian pada akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan maupun organisasi non profit lainnya. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk melaksanakan *good governance*.

## *2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja (Erlina, 2013).

## *2.3. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)*

Menurut Jonas dan Blanchett (2000) kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dirancang tidak menyesatkan kepada pengguna. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maka harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yang menyatakan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yaitu Relevan, Andal, Dapat dipahami dan Dapat dibandingkan.

## *2.4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)*

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan pesyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (PP nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 3).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang penerapan SAP pada pemerintah daerah. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang berkualitas, transparan dan akuntabel dan terdapat dua belas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dalam PP 71 Tahun 2010 tentang SAP.

## 2.5. Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP)

Arens (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Komponen pengendalian internal meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktifitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan.

Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP dalam lingkungan kerjanya melalui (a) penegakan integritas dan nilai etika (b) komitmen terhadap kompetensi (e) kepemimpinan yang kondusif (d) pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan (e) pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat (f) penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia (g) perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif dan (h) hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait (Irwan, 2011).

## 2.6. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku, yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya (Safri, 2002). Hal ini sejalan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A tahun 2003 tentang pedoman penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS yang menyebutkan bahwa: “Kompetensi adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional, efektif dan efisien”.

## 2.7. Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Menurut Jogiyanto dan Abdillah (2010), pemanfaatan teknologi informasi pada sebagian besar perusahaan saat ini bukan lagi menjadi barang langka yang sulit ditemukan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa teknologi informasi telah menjadi kebutuhan sekaligus persyaratan bagi organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Teknologi informasi sangat dibutuhkan organisasi untuk membantu mencapai tujuannya, namun pengadaan Teknologi informasi membutuhkan investasi yang besar. Investasi Teknologi informasi yang sudah dikeluarkan perusahaan harus dapat dijalankan dengan maksimal. Teknologi informasi pada organisasi tidak cukup hanya diatur oleh bagian Teknologi informasi saja, tetapi harus dikelola (govern) secara profesional.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik

## 2.8. Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK- OPD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dijelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD, yang melaksanakan tugas administrasi keuangan, sebagai salah satu pendukung terbitnya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam Pasal 1 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD. Yang ditugaskan untuk: (a) Meneliti kelengkapan SPP (UP, GU, LS, TU), (b) Melakukan verifikasi SPP, (c) Menyiapkan SPM, (d) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan (Khusus OPD Pengelola Pendapatan Daerah), (e) Melaksanakan akuntansi dalam rangka menyusun laporan keuangan OPD.

## 3. Metode Penelitian

### 3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

#### 3.1.1. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kualitas laporan keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini kualitas yang harus dipenuhi dalam pembuatan laporan keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yaitu karakteristik kualitatif yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah antara lain :

- Relevan (informasi yang relevan yaitu memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap
- Andal (penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas)
- Dapat dipahami (informasi yang disajikan jelas dan sederhana baik dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan);
- Dapat dibandingkan (laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kinerja masa lalu dan pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis). Variabel ini diukur dengan 8 item pernyataan.

#### 3.1.2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual (X1)

Penerapan SAP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan SAP oleh pengelola keuangan disetiap OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyusun Laporan keuangan yang mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP yang terdiri atas 12 pernyataan standar. Adapun indikator variabel ini adalah: a) penyajian laporan keuangan; b) laporan realisasi anggaran; c) laporan arus kas; d) catatan atas laporan keuangan; e) akuntansi persediaan; f) akuntansi investasi; g) akuntansi aset tetap; h) akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; j) akuntansi kewajiban; j) koreksi kesalahan; k) laporan keuangan konsolidasi; l) laporan Operasional. Variabel ini diukur dengan 11 item pernyataan.

#### 3.1.3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X2)

SPIP yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan seluruh aparatur sipil negara dan seluruh perangkat dimasing-masing OPD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan pemerintah.

Dimensi dan indikator dan variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ini diukur menggunakan instrumen kuesioner dengan model skala likert lima yang didasarkan pada PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagaimana yang digunakan oleh Irwan (2011) dan Sudiarianti (2015), yaitu: a) Lingkungan pengendalian; b) Penilaian risiko; c) Aktivitas pengendalian; d) Informasi dan komunikasi; dan e) Pemantauan. Variabel ini diukur dengan 30 item pernyataan sebagaimana digunakan oleh Irwan (2011) dan Sudiarianti (2015).

### *3.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X3)*

Kompetensi SDM yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan pada masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan tugas jabatan. variabel ini menggunakan dimensi dan indikatornya diperoleh dari Wayat dalam Ruky (2003); Irwan (2011), Sudiarianti (2015) sebagai berikut: 1) Pengetahuan (Knowledge) adalah pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan OPD untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidangnya; 2) Keterampilan (Skill) adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap pegawai pengelola keuangan OPD untuk melaksanakan suatu tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah secara maksimal; 3) Perilaku (Attitude) adalah pola tingkah laku pegawai pengelola keuangan OPD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Variabel ini diukur dengan 9 item pernyataan.

### *3.1.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)*

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al, 2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi oleh seluruh organisasi perangkat daerah agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat dan pihak eksternal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Untuk mengukur teknologi informasi dapat dilihat dari tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi (Jumali dan Supomo, 2002). Hal ini juga mengacu kepada PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah, maka variabel dalam penelitian ini menggunakan dimensi dan indikatornya yaitu: 1) Laporan akuntansi dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi lebih cepat, mudah dan akurat; 2) Jaringan internet dan jaringan komputer telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai penghubung dalam pengiriman informasi yang dibutuhkan telah terpasang di unit kerja; 3) Proses akuntansi dan pelaporan dilakukan secara komputerisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 4) Subbagian pengelola keuangan memiliki komputer dengan jumlah yang cukup untuk melaksanakan tugas; 5) Jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur dan tepat pada waktunya. Variabel ini diukur dengan 8 item pernyataan.

### *3.1.6. Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (PPK-OPD) (X5)*

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-OPD, kepala OPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada masing-masing OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai PPK-OPD. Dimensi dan indikator dari variabel Peran PPK-OPD ini diperoleh dari Permendagri pasal 13 Nomor 13 Tahun 2006 dan pernah digunakan oleh Febrian dan Basukianto (2015), yaitu: a) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; b) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c) melakukan verifikasi SPM; d) menyiapkan SPM; e) melakukan

verifikasi harian atas penerimaan; f) melaksanakan akuntansi OPD; dan g) menyiapkan laporan keuangan OPD. Variabel ini diukur dengan 11 item pernyataan.

### 3.2. Metode Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebanyak 36 OPD. Sampel yang diambil adalah setiap OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai penanggung jawab Laporan Keuangan OPD. Jumlah OPD sebanyak 36 (tiga puluh enam) dengan masing-masing 2 responden pada setiap OPD sehingga total sampel sebanyak 72 orang. Responden yang dituju yaitu Kepala OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang memiliki tanggung jawab dan tugas pokok fungsi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan dianggap mengetahui dan memahami tema penelitiannya.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.1. Hasil Analisis Regresi Logistik

Untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual (X1), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4), dan Peran PPK-OPD (X5) terhadap variabel dependen yaitu, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) digunakan model regresi linier berganda.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 80,530 dengan angka signifikansi = 0,000. Karena nilai signifikansi dari data analisis lebih kecil dari 0,05 maka dapat diartikan bahwa model penelitian ini adalah layak atau dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran PPK-OPD secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (adjusted R square) sebesar 0,849, yang berarti bahwa 84,9% variasi besarnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran PPK-OPD. Sedangkan sisanya sebesar 15,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Tabel 1 menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis variabel penerapan SAP berbasis akrual (X1) menunjukkan bahwa variabel penerapan SAP berbasis akrual mempunyai pengaruh positif terhadap variabel kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Hipotesis pertama yang menyatakan "penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah" diterima". Hal ini mempunyai makna bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pengelolaan keuangan di OPD akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Nilai hasil uji hipotesis variabel independen sistem pengendalian intern pemerintah (X2) menunjukkan nilai positif. Hipotesis kedua yang menyatakan "sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah" diterima". Dari hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, semakin bagus penerapan SPIP semakin baik kualitas LKPD.

Nilai koefisien regresi hasil uji hipotesis variabel independen kompetensi sumber daya manusia (X3) bernilai positif. Hipotesis ketiga yang menyatakan “kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah “diterima”. Dari hasil analisis tersebut mempunyai makna bahwa peningkatan kompetensi sumber daya Manusia OPD akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil uji hipotesis variabel pemanfaatan teknologi informasi (X4) bernilai positif. Hipotesis keempat yang menyatakan “pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah “diterima”. Dari hasil analisis tersebut mempunyai makna bahwa peningkatan pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan oleh OPD akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Variabel independen Peran PPK-OPD (X5) menunjukkan hasil uji hipotesis bernilai positif. Hipotesis kelima menyatakan “Peran PPK-OPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ”diterima”. Dari hasil analisis tersebut, menunjukkan bahwa Peran PPK-OPD berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, semakin baik peranan PPK-OPD semakin baik dalam menghasilkan kualitas LKPD

Table 1. Hasil Regresi

Variabel	Koefisien	t-stat	Sig
Penerapan SAP berbasis akrual (X1)	0,160	2,262	0,027
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X2)	0,191	5,352	0,000
Kompetensi SDM (X3)	0,204	2,005	0,049
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4)	0,279	3,469	0,001
Nilai F	80,53		
Sig_F	0,000		
R Square	0,849		

#### 4.2. Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memiliki pengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil tersebut memiliki makna bahwa pengelola keuangan pada OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki penerapan standar akuntansi berbasis akrual yang baik, artinya pengelola keuangan OPD telah memahami tentang pengakuan pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis aktual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas yang digunakan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Pengelola keuangan OPD telah memahami tentang laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE), neraca dan catatan atas laporan keuangan. LO yang berisi pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit menyediakan informasi yang tidak diakomodir dalam LRA, yang hanya menyajikan pendapatan dan belanja berdasarkan kas yang diterima atau dikeluarkan. Penggunaan basis akrual dengan pemahaman yang baik dapat menghasilkan informasi laporan keuangan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan.



#### *4.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Variabel SPIP (X2) memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar 0,191. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengendalian intern meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,191. Dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi sistem pengendalian intern maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

#### *4.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*

Berdasarkan hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikannya sebesar 0,049 yang bernilai positif. Hasil ini memiliki makna semakin tinggi kompetensi pengelola keuangan, maka semakin berkualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan. Artinya bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

#### *4.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*

Berdasarkan pengujian hipotesis, Variabel PTI (X4) memiliki nilai koefisiensi regresi sebesar 0,279. Hal ini menunjukkan bahwa jika pengendalian intern meningkat satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,279, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

#### *4.6. Peran PPK-OPD dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*

Berdasarkan hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel peran pejabat penatausahaan keuangan OPD memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikannya sebesar 0,000 yang bernilai positif. Hasil ini memberikan makna bahwa semakin baik pejabat penatausahaan keuangan-OPD dalam menjalankan tugasnya maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat. Berdasarkan tanggapan responden yang juga merupakan pejabat pengelola keuangan dan pejabat penatausahaan keuangan OPD pada Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memperkuat hasil analisis regresi diatas, dimana dari tanggapan responden atas peran pejabat penatausahaan keuangan-OPD yang terdiri dari proses verifikasi, menerbitkan SPM, menjalankan fungsi akuntansi OPD dan menyusun laporan keuangan menunjukkan penilaian yang sangat baik atau dalam kategori sangat setuju. Artinya aparatur sipil negara mengakui bahwa seorang pejabat penatausahaan keuangan OPD perlu memahami akan tugas sebagai fungsi tata usaha keuangan di OPD dengan baik. Dibawah bagian inilah fungsi verifikasi, rekonsiliasi dan sekaligus akuntansi OPD dilakukan. Dua output penting

bagian ini adalah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) dan Laporan Keuangan OPD yang merupakan dokumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya pemahaman akuntansi yang harus dimiliki oleh seorang PPK-OPD. Karena ia akan lebih mudah dalam menerjemahkan setiap transaksi yang terjadi.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran PPK-OPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Semakin baik Penerapan SAP berbasis akrual maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
- Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Artinya bahwa, semakin baik pelaksanaan setiap unsur SPIP maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
- Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Artinya bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
- Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Artinya bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.
- Peran PPK-OPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Artinya bahwa, semakin berperan baik PPK-OPD dalam pengelolaan administrasi keuangan maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan..

## Daftar Pustaka

- Badan Kepegawaian Negara. 2003. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
- Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- BPK-RI. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor : 06.A/LHP/XVIII.BKL/05/2016, 27 mei 2016.
- . 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor : 21.A/LHP/XVIII.BKL/05/2017, 30 mei 2017.
- Byars, L, dan Rue, L.W. 1997. Human Resources Management, 5th Ed, Irwin, Chicago. Flippo, Edwin B.1982, Personnel Management, McGraw-Hill, USA.
- Cahyo, Febrian dan Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol. 22, No. 2. ISSN: 1412-3126.
- Darwanis dan Mahyani, Dwi D. 2009. Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemanfaatan Teknologi informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Telaah dan Risert Akuntansi Vol 2 No 2 Juli 2009 Hal 133-151.
- Davis, F. D. 1989. Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. MIS Quarterly, 13, 319-340.
- Donaldson, Lex dan Davis, James, H., 1991, Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns, Australian Journal of Management

- Eisenhardt, Kathleem. 1989. Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*, 14. Hal 57-74.
- Fikri, Inapty dan Martiningsih. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating. *Simporsium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara*.
- Gilardi, Fabrizio. 2001. Principal-agent models go to Europe: Independent regulatory agencies as ultimate step of delegation. Paper presented at the ECPR General Conference, Canterbury (UK).
- Ghozali, 2013. *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Harahap Sofyan Safri, 2002. *Teori Akuntansi Laporan Keuangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hair, J.F, Black, W.C, Babin, B.J, Anderson, R.E, and Tatham, R.L. 2006. *Multivariate Data Analysis*, 6th Edition. New Jersey : Pearson Prentice Hall.
- Heri Susilawati, 2016. Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sigi. *e Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 6, Juni 2016 hlm 12-21. ISSN: 2302-2019.
- Hutapea, Parulin dan Nuriana, Thoha. *Kompetensi Plus Teori, Desain Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*. 2008. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Indriasih, D. 2014. The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol.5, No.20 ISSN 2222-2847.
- Indriyani, desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir), *Jurnal SN*. Pontianak.
- Irwan, D. 2011. Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tesis. Universitas Negeri Padang.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . "Journal of Financial Economics", V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>
- Jogiyanto. 2007. *Model Kesuksesan Sistem Teknologi Informasi*. Penerbit Andi : Jogjakarta.
- Jurnali, Teddy dan Bambang Supomo. 2002. Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Teknologi dan Pemanfaatan TI terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 5 No. 2 Hal. 214-228.
- Karmila. Tanjung, A.R. dan Darlis, E. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Sorot* Vol. 9 No.1 Lembaga Penelitian Universitas Riau. ISSN 1907-364X.
- Kuangan Republik Indonesia (BPK RI). Melalui <http://www.bpk.go.id>
- Kristiawati, Endang. 2015 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat. *Akuntabilitas* Vol. III No.3 Desember 2015 Universitas Panca Bhakti Pontianak. ISSN 1979-858X.
- Lane, Jan-Erik, 2003, *Management and Public Organization: The Principal-Agent Framework*, University of Geneva and National University of Singapore, Working paper.
- Mahaputra, Rahma Upabayu I.P. dan Putra, I.W. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2 (2014) 230-244.
- Mahmudi, 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Manaf, Arfan dan Darwanis. 2014. Pengaruh pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Intern terhadap proses Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Inspektorat dan implikasinya terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol. 3 No.4 ISSN2302-0164.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI Yogyakarta.
- Michael C. Jensen, William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structur. *Journal of Financial Economic*. V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Mohamad, H, Laode, R.A.S.U.L.I dan Machmud, R. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Gorontalo). *KIM Fakultas Ekonomi&Bisnis*, 2 (1).
- Ningtyas, Eka Pravitasari dan Widayati, Dini. 2015. Pengaruh Efektivitas Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol.4 No1.
- Nordiawan, D. dan Hertianti, A. 2010. *Akuntansi Sektor Publik* Edisi 2 Jakarta: Salemba Empat
- Nugraheni, Purwaniati dan Subaweh, Imam, 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, No.1 Vol. 13, hal 48-58.

- Otley, DT, 1980, The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis. *Accounting and Organization Society* 5(4) 413-428.
- Prapto. 2010 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tesis. Universitas Sebelas Maret.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Ruki. Ahmad.S. 2003. Sumber Daya Manusia Berkualitas Mengubah Visi Menjadi Realitas. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Setyowati dan Isthika. 2014. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang. *Proceedings SNEB* 2014.
- Shahwan, Yousef 2008 Qualitative Characteristics of Financial Reporting: A Historical Perspective. *Journal of Applied Accounting Research*. 9 (3), pp. 192-202
- Siahaan dan Fachruzamman, 2013. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang. Universitas Bina Nusantara.
- Sudiaranti, M.N. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Thesis. Universitas Udayana.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Syaripudin, 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. *Jurnal Fokus Bisnis* Vol.14 No.02 Tahun 2014.
- Udiyanti, Atmadja dan Darmawan. 2014. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Vol.2 No 1 Tahun 2014
- Wilkinson, W. Joseph, Michael J. Cerullo, Vasant Raval, and Bernard Wong OnWing. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts and Applications*. Fourth Edition. John Wiley and Sons. I nc.
- Zaki Baridwan, 2004, *Intermedite Accounting*, BPFE : Yogyakarta
- Zeyn, E., 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37